

ABSTRAK

Daerah Provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Kewenangan antara Pusat dan Daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI 1945) Diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Metode penelitian ini difokuskan pada penelitian empiris yaitu bertujuan menganalisis hukum yang bekerja pada masyarakat dan menggunakan pendekatan eksploratif dengan semua sumber yang diperoleh dianggap penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pemerintah Kabupaten Berwenang memberikan pemberdayaan dan memberikan perlindungan terhadap petambak garam serta memberikan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan. Implementasi dari kewenangan tersebut berupa pendidikan dan pelatihan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan penguatan kelembagaan pelaku utama Petambak Garam, pemberian bantuan peralatan untuk pengolahan, pemasaran.

Kata kunci : kewenangan, petambak garam, optimalisasi.

ABSTRACT

Provinces are divided into regency and city areas. Each province, district and city area has a local government which is regulated by law. The authority between the Center and the Regions is regulated in law by taking into account the specificity and diversity of the regions (Article 18 A paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). 23 of 2014 concerning Regional Government.

This research method is focused on empirical research, which aims to analyze the law that works in society and uses an exploratory approach with all sources obtained are considered important to answer the problems in this research.

The Regency Government has the authority to empower and provide protection for salt farmers as well as to provide supervision over the performance of planning and implementation. The implementation of this authority is in the form of education and training, business partnerships, easy access to science, technology, and information, and institutional strengthening of the main players of salt farmers, providing assistance with equipment for processing and marketing.

Keywords: authority, salt farmers, optimization.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis penelitian	11
1.6.2 Metode pendekatan	12
1.6.3 Lokasi penelitian.....	13
1.6.4 Jenis dan sumber.....	13
1.6.5 Teknik pengumpulan data	15
1.6.6 Analisah bahan hukum.....	16
 BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	 17
2.1 Bentuk Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penganggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	 17

2.1 1	Peraturan Mengenai Penganggaran Pemerintah Daerah	25
2.1 2	Perlindungan Terhadap Petambak Garam	26
2.1 3	Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	27
2.2	Pengertian Garam Rakyat	30
2.2.1	Cara Mengelolah Garam.....	31
2.2.2	Kelompok Usaha Garam Rakyat.....	33
2.3	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.....	34
2.3.1	Perinsip Program Usaha Garam Rakyat	35
2.3.2	Tujuan Program Usaha Garam Rakyat	36
2.3.3	Dasar Hukum Program Usaha Garam Rakyat	37

BAB III PEMBAHASAN IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI GARAM RAKYAT 39

3.1	Kewenangan daerah dalam mendukung optimalisasi produksi garam rakyat ..	39
3.1.1	Deskripsi Wilayah.....	39
a.	Pemerintah	40
b.	Geografi Dan Administrasi	41
c.	Iklim.....	42
d.	Perekonomian.....	43
e.	Sumber Daya Alam	46
f.	Pertanian	47
3.1.2	Kewenangan Kabupaten Sumenep Dalam Mendukung Optimalisasi Garam Rakyat	48
3.2	Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Kebijakan Anggaran Untuk Meningkatkan Optimalisasi Produksi Garam Rakyat	61

BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	79
Daftar Pustaka	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data bantuan tahun 2020 (Dari APBN)

Table 3.3 Data Bantuan Tahun 2021 (Dsri APBN)

Tabel 3.3 Data Bantuan Tahun 2021 (Dari APBD Kabupaten)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 dana bantuan tahun 2018 (Dari APBD Provinsi)

Gambar 3.2 dana bantuan tahun 2019 (Dari APBD Provinsi)

Gambar 3.3 dana bantuan tahun 2020 (Dari APBD Provinsi)

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Dokumentasi Wawancara Dengan Mahasiswa Bernama Rasidi Dan Petani Garam Yang Bernama Bapak Saipul Di Desa Karanganyar
- Lampiran 2** Dokumentasi Di Lahan Tambak Garam
- Lampiran 3** Dokumentasi Dengan Mahasiswa Dan Pekerja/Buruh Di PT.Garam
- Lampiran 4** Dokumentasi Di Kantor PT. Garam
- Lampiran 5** Dokumentasi Bimbingan Serta Arahan Terkait Tugas Akhir